

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016) Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut.”

2.1.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Ikatan Akuntan Indonesia (2018) menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kriteria yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00. (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00. (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00. (lima puluh milyar rupiah).”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut (PPRI, 2021):

1. “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
2. “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau

Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

3. “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

2.1.3 Karakteristik UMKM

Menurut (Vinatra, 2023) UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan besar. Beberapa karakteristik umum UMKM antara lain:

1. Modal terbatas: UMKM umumnya dimulai dengan modal yang terbatas. Pemilik usaha sering kali bergantung pada tabungan pribadi, pinjaman kecil, atau bantuan keuangan dari keluarga atau teman.
2. Jumlah karyawan terbatas: UMKM biasanya memiliki jumlah karyawan yang terbatas. Beberapa bahkan hanya dijalankan oleh satu orang atau keluarga pemilik usaha. Namun, ada juga UMKM yang memiliki beberapa puluh karyawan.
3. Pasar lokal atau regional: UMKM cenderung fokus pada pasar lokal atau regional. Mereka melayani kebutuhan dan permintaan di

daerah sekitar mereka, meskipun beberapa juga bisa beroperasi secara nasional atau bahkan internasional.

4. Inovasi dan fleksibilitas: UMKM sering kali memiliki keunggulan dalam inovasi dan fleksibilitas. Mereka dapat dengan cepat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan perubahan tren atau kebutuhan pasar yang baru.
5. Tingkat kepemilikan yang individual atau keluarga: UMKM sering kali dimiliki dan dijalankan oleh individu atau keluarga. Ini memberikan sentuhan pribadi dalam operasionalnya dan pemilik usaha sering kali terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Gusherinsya & Samukri (2020) Laporan keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi yang disusun secara periodik oleh manajemen perusahaan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan. Laporan ini mencerminkan kinerja dan situasi keuangan perusahaan pada periode sebelumnya, menekankan sifat historisnya dengan menyajikan angka-angka yang relevan.

Rochman dan Pawenary (2020) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi informasi dan penjelasan mengenai data ekonomi perusahaan. Ini mencakup daftar-daftar yang mencerminkan posisi keuangan dan hasil

kegiatan perusahaan selama satu periode, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan keuangan.

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas tertentu. Informasi ini bermanfaat bagi berbagai pengguna yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi, termasuk mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (Prasetyo et al., 2020).

2.2.2 Faktor Penting Adanya Laporan Keuangan

Soejono, Sunarni, Kusmawati, Samuel, dan Angeliana (2020) menjelaskan bahwa terdapat 5 faktor penting adanya laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan keuangan menyajikan informasi yang jelas mengenai situasi keuangan suatu perusahaan, memberikan pemahaman kepada calon investor tentang kinerja perusahaan serta memperlihatkan pengelolaan dan performa perusahaan. Investor juga dapat menilai potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi di perusahaan tersebut.
2. Laporan keuangan dapat menjadi acuan bagi pelanggan dalam mempercayai suatu perusahaan. Stabilitas laporan keuangan dapat diartikan oleh pelanggan sebagai indikator keamanan perusahaan.
3. Laporan keuangan perusahaan memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan kepada karyawan, memberikan kepastian terkait

penggajian, dan meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk bekerja lebih lama di perusahaan tersebut.

4. Laporan keuangan perusahaan yang stabil dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, memberikan peluang investasi saham yang memiliki nilai yang lebih tinggi.
5. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kondisi usaha, membantu pemilik usaha dalam menentukan kebijakan di periode berikutnya.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut (Novriansyah et al., 2020) Secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu :

a. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah asset (harta), kewajiban (hutang) dan modal (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.

b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi tergambar jumlah pendapatan dan sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan kata lain suatu laporan laba rugi, mengukur jumlah

laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

c. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab- sebab terjadinya perubahan modal.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan ini terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar.

e. Laporan catatan atas laporan keuangan Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Menurut Kirowati & Amir (2019) SAK EMKM adalah kepanjangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro yang dirancang secara khusus sebagai patokan standar akuntansi keuangan pada UMKM. Standar Keuangan ini disusun

dan disahkan oleh IAI atau Ikatan Akuntasi Indonesia sebagai sebuah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia mulai 1 Januari 2018, DSAK IAI akan memberlakukan SAK baru khusus untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM diterbitkan untuk membantu EMKM di Indonesia yang saat ini jumlahnya mencapai 57 Juta serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 60%. Kebanyakan EMKM ini adalah para pelaku usaha kecil yang memiliki prospek usaha namun tidak memiliki akses yang baik kepada sumber pendanaan, khususnya perbankan dengan alasan EMKM ini tidak memiliki laporan keuangan yang dapat diterima sebagai dasar bagi perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk bisa memberikan pinjaman dana.

Uno, Kalangi, dan Pusung (2019) standar akuntansi adalah seperangkat prinsip, metode, teknik, dan elemen lain yang secara sengaja dipilih oleh badan penyusun standar atau pihak berwenang berdasarkan kerangka konseptual. Hal ini bertujuan untuk diterapkan di suatu negara atau lingkungan tertentu, yang kemudian diatur dalam dokumen resmi. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan dalam lingkup negara yang bersangkutan.

2.3.2 Ruang Lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menjelaskan bahwa SAK EMKM memiliki ruang lingkup yang mencakup:

1. SAK EMKM ditujukan untuk diterapkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, seperti yang terdapat pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dimana definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sudah dijelaskan dalam undang-undang Republik Indonesia, setidaknya dua tahun berturut-turut.
2. SAK EMKM dapat diterapkan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria UMKM, apabila terdapat otoritas yang memberikan izin kepada entitas dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.3.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan dalam SAK EMKM

Ikatan Akuntan Indonesia (2018) menjelaskan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan serta menginformasikan tentang keadaan keuangan perusahaan dalam periode tertentu. SAK EMKM merupakan standar yang berdiri sendiri dan ditujukan untuk diterapkan oleh EMKM yang tidak atau belum mampu dalam memenuhi standar akuntansi yang terdapat di dalam SAK ETAP. SAK EMKM menjelaskan bahwa dalam menyusun laporan keuangan perusahaan minimum terdiri atas:

1. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi yaitu laporan yang berisi pendapatan dan beban selama periode tertentu. Dengan laporan ini, dapat diketahui

laba atau rugi pada kegiatan usaha suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan laba rugi dibutuhkan oleh pihak internal (tim manajemen dan dewan direksi) dan pihak eksternal (investor dan kreditur) suatu entitas yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan yaitu laporan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai informasi keuangan entitas berupa aset (harta), liabilitas (kewajiban/utang), dan ekuitas (modal) entitas yang dibuat dan diterbitkan pada setiap akhir periode akuntansi. Penggunaan neraca bertujuan untuk mengidentifikasi tren ekonomi berjalan dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Data dan informasi tersebut dapat digunakan oleh investor dan kreditur untuk menentukan kelayakan investasi dan pemberian kredit terhadap bisnis suatu entitas.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yaitu berisi penjelasan tentang asumsi, prinsip, dan metode yang digunakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Sesuai dengan SAK EMKM, catatan atas laporan keuangan (CALK) pada kegiatan UMKM harus memuat informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan, dan berisi

mengenai pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi SAK EMKM.

Ketika menyajikan laporan keuangan, perusahaan dapat menyajikan komponen laporan keuangan yang lain, seperti laporan arus kas yang tidak wajib di cantumkan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, apabila dirasa penambahan laporan tersebut dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pengguna laporan keuangan.

2.3.4 Pengukuran Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016) pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

2.3.5 Penyajian Wajar Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016a) penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai dengan persyaratan SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa,

dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
2. Representasi tepat: informasi dalam laporan keuangan mempresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
3. Keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
4. Keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

2.3.6 Kerangka Konsep Laporan Keuangan Sesuai dengan SAK EMKM

Laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Berikut kerangka konsep laporan keuangan laba rugi yang sesuai dengan SAK EMKM:

Tabel 1. Kerangka Konsep Laporan Laba Rugi

LAPORAN LABA RUGI		
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Mei 2024		
(Dalam Rupiah)		
Penjualan		
Penjualan		XXX
Diskon Penjualan & Retur		-
Penjualan Bersih		XXX
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Barang Jadi 1 Mei	XXX	
Harga Pokok Produksi	XXX	
Persediaan Barang Jadi Tersedia untuk Dijual	XXX	
Persediaan Barang Jadi 31 Mei	XXX	
Harga Pokok Penjualan		XXX
Laba Kotor		XXX
Biaya Lain-Lain		XXX
Laba Bersih		XXX
Laba/Rugi Berjalan		XXX
Total Laba Usaha		XXX

Sumber: SAK EMKM 2023

Tabel 2. Kerangka Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Per 31 Mei 2024		
(Dalam Rupiah)		
Keterangan	31 April 2024	
ASET		
<u>ASET LANCAR</u>		
Kas	XXX	
Tabungan	XXX	
Persediaan	XXX	
Piutang Usaha	XXX	
Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
<u>ASET TETAP</u>		
Aset Tetap	XXX	
Akumulasi Penyusutan	XXX	
Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX
Total Aset Lancar & Tetap		XXX
KEWAJIBAN & EKUITAS		
<u>KEWAJIBAN</u>		
Utang Usaha	XXX	
Jumlah Kewajiban	XXX	XXX
<u>EKUITAS</u>		
Modal Kekayaan Maudy Batik	XXX	
Laba/Rugi Tahun Berjalan	XXX	
Jumlah Ekuitas	XXX	XXX
Total Kewajiban & Ekuitas		XXX

Sumber: SAK EMKM 2023

Tabel 3. Kerangka Konsep Catatan Atas Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER MEI 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
<p>1. UMUM</p> <p>Entitas didirikan pada tahun XXXX dan telah memenuhi kriteria sebagai UMKM sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008, Entitas bergerak di bidang Manufaktur yang berdomisili di XX Jalan XX No. XX</p> <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Pernyataan Kepatuhan</p> <p>Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK EMKM.</p> <p>b. Dasar Penyusunan</p> <p>Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan</p> <p>c. Piutang Usaha</p> <p>Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>Entitas Memiliki Piutang Usaha dari Pelanggan sebesar Rp.XXXX</p> <p>d. Persediaan</p> <p>Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi</p>

biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan actual fasilitas produksi,

e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya, jika asset tetap tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode penyusutan garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika barang sudah keluar dari persediaan dan dalam perjalanan ke pembeli baik melalui pembayaran secara tunai maupun secara kredit.

Sedangkan beban diakui saat terjadi beban.

3. KAS

Kas	Rp. XXX
-----	----------------

4. PIUTANG DAGANG

Toko	Rp. XXX
------	----------------

5. UTANG USAHA

Toko	<u>Rp. XXX</u>
------	----------------

Jumlah Utang Usaha	Rp. XXX
--------------------	----------------

6. ASET TETAP

Aset Tetap	Rp. XXX
Akumulasi Penyusuaian	<u>(Rp. XXX)</u>
Jumlah Aset Tetap	Rp. XXX
7. PENJUALAN	
Total Penjualan	Rp. XXX
8. HARGA POKOK PENJUALAN	
Persediaan Awal	Rp. XXX
Pembelian	Rp. XXX
Beban Ongkos Pembelian	Rp. XXX
Retur Pembelian	-
Persediaan Akhir	<u>(Rp. XXX)</u>
Harga Pokok Penjualan	Rp. XXX
9. BEBAN-BEBAN	
Beban Operasional	Rp. XXX
Beban Lain-Lain	<u>Rp. XXX</u>
Total Beban	Rp. XXX

Sumber: SAK EMKM 2023

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aulia Dzaky Naufal Medyanto, (2024), Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Batik Jetis Sidoharjo)	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini berupa rancangan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan menyajikan laporan labar rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.
2.	Diajeng Amatullah Azizah Rachmanti, Misrin Hariyati, Andrianto, (2019), Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Batik Jumput Dahlia Berdasarkan SAK EMKM.	Metode Deskriptif Kualitatif	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa laporan keuangan pada UMKM Batik Jumput Dahlia. Analisis Penyusunan Laporan Keuangan hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan UMKM Batik Jumput Dahlia menyajikan posisi keuangan tahun 2016 dan 2017 per 31 Desember 2016, Pernyataan bahwa penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan yang digunakan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan dan disajikan dalam

			laporan	
3.	Immu Puteri Sari, Fitri Yulianis, Rambun Pamenan , (2022)	Metode Deskriptif Kualitatif	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM pada usaha Karak Kaliang Marisa.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sistem pencatatan keuangan pada Usaha Karak Kaliang Marisa dicatat secara manual dan masih sangat sederhana, karena pemilik masih belum memahami cara menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan karena keterbatasan waktu sehingga untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM masih belum diterapkan.
4.	Iswandir (2019)	Metode Deskriptif Kualitatif	Penerapan SAK EMKM pada Usaha Dagang Toko Rizky Busana.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembukuan yang dilakukan oleh Toko Rizky Busana sangat sederhana dan belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah pada pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019.
5.	Melissa, Priatna Aryanto (2023).	Metode Deskriptif Kualitatif	Penerapan SAK	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pencatatan laporan keuangan pada UMKM Yanto Mebel Kota Tegal yang

EMKM pada penyusunan laporan keuangan UMKM Yanto Mebel Kota Tegal.

sebelumnya tidak sesuai dengan SAK EMKM setelah diterapkan sesuai dengan standar yang ada menghasilkan laporan keuangan yang jelas dan berkualitas. Serta dapat diketahui faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala dalam pencatatan laporan keuangan UMKM Yanto Mebel Kota Tegal.
